



PEMERINTAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR

KECAMATAN ILE BOLENG

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ)



KANTOR CAMAT ILE BOLENG

TAHUN : 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang maha Kuasa, karena atas berkat dan karuniaNya serta dukungan dari semua unsur Aparatur Kecamatan Ile Boleng maka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kecamatan Ile Boleng tahun 2021 merupakan laporan yang dibuat setiap tahun sebagai bahan evaluasi Camat dalam mengikuti Rapat Kerja Daerah (Rakerda) baik tingkat Kabupaten maupun Propinsi.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Laporan ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Ile Boleng pada masa yang akan datang.

Akhirnya atas segala partisipasi dalam menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng ini menjadi acuan dalam tugas dan fungsi pelayanan kita kepada masyarakat.

Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Terima kasih .

Senadan, 25 Januari 2022

Camat Ile Boleng,

UMAR RAYA DAEN,S.IP

Pembina

NIP. 1964065221988031012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab.I : Pendahuluan.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	2
C. Gambaran Umum Daerah.....	2
Bab.II. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	7
Bab.III. Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.....	10
3.1. Capaian Pselaksanaan Program dan Kegiatan	10
3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan	16
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	16
Bab. IV. Penutup	18
a. Kesimpulan	18
b. Saran.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang no. 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tkt. I Bali, NTB, dan NTT (LNRI Tahun 1958, No. 122, tambahan LNRI No. 1655).
2. Undang – Undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 no. 126, Tambahan LNRI no. 4438).
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2014 No.244, Tambahan LNRI No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP pengganti UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2014 no. 26, Tamabahan LNRI no.5589).
4. Undang-Undang no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LNRI tahun 2014 no. 292, Tambahan LNRI No. 5061).
5. PP No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 No. 165, Tambahan LNRI No. 4593).
6. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI tahun 2007 no. 82, Tambahan LNRI no.4737).
7. PP no.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (LNRI tahun 2008 no. 127).
8. PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Perda Kabupaten Flores Timur no. 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten flores Timur (LD tahun 2016 no. 11 Tambahan LD no.0140).
10. Perbup. Flotim no. 15 tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Bupati Flores Timur kepada Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten flores Timur.
11. Perbup. Flores Timur no. 31 tahun 2017 tentang Uraian tugas Kecamatan.
12. Surat Bupati Flores Timur, Nomor : 130/77/Adm.Pem/2021, tanggal 17 Desember 2021 tentang Penegasan Penyusunan LKPJ Tahun 2021.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka Penyusunan LKPJ sebagai Pencapaian Kinerja Laporan, maka semua ini tidak terlepas dari Visi Kepala Daerah yakni : ***"Flores Timur Sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata"***, dengan 5 Misi yaitu :

1. Selamatkan Orang Muda
2. Selamatkan Infrastruktur
3. Selamatkan tanaman Rakyat
4. Selamatkan Laut
5. Reformasi Birokrasi

Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. ***Flores Timur Sejahtera*** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.

2. ***Desa Membangun Kota Menata*** adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk pemukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa Membangun Kota Menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 telah ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur yang merupakan rumusan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. ***Selamatkan Orang Muda Flores Timur:*** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
2. ***Selamatkan Infrastruktur Flores Timur :*** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
3. ***Selamatkan Tanaman Rakyat flores Timur:*** dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

4. **Selamatkan Laut Flores Timur** : dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu member jaminan kehidupan layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.
5. **Reformasi Birokrasi** : dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government.
Sebagai salah satu SKPD, maka Kantor Camat Ile Boleng berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.
Sebagai akhir dalam Pencapaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka kondisi terakhir tidak maksimal pencapaian karena dampak Virus Corona 19 yang melanda, khususnya di Kabupaten Flores Timur.

1.3. Data Umum Daerah

1. Data Geografis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 08 Tahun 2004, wilayah Ile Boleng yang sebelumnya berstatus sebagai perwakilan kecamatan Adonara Timur ditetapkan sebagai kecamatan definitif dengan nomenklatur Kecamatan Ile Boleng sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi 21 (dua puluh satu) Desa, yaitu :

Secara Geografis batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gunung Boleng
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Boleng
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Witiama
sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Adonara Timur.

Keadaan topografi bervariasi seperti daratan lembah perbukitan dan lereng gunung serta tinggi dari permukaan laut terdiri dari :

1.	0 – 5 m	: 8,74 km ²
2.	5 – 25 m	: 16 km ²
3.	25 – 100 m	: 15,20 km ²
4.	500 - 100 m	: 19 km ²
5.	100 – 1500 m	: 13 km ²
6.	1500m	: 23 km
7.	Kawah Gunung Ile Boleng	: 1.596m

Kecamatan Ile Boleng beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 400-500 mm/tahun.

Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan Layanan kemasyarakatan Pemerintah Kecamatan Ile Bolemg didukung dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kecamatan Ile Boleng baik instansi Vertikal otonom dan BUMN/BUMD yang ditempatkan pada wilayah termasuk penempatan personil PNS maupun Tenaga Kontrak Daerah serta Pihak Keamanan. Selama ini kerjasama yang terjalin cukup baik.

2. Jumlah Penduduk

No.	Nama Desa	Luas Wilayah	Jumlah KK			Jumlah Penduduk			Ketr.
			L	P	Jlh	L	P	Jlh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bedalewun	2.00	137	70	207	330	377	707	
2	Nihaone	2.34	166	72	238	402	460	862	
3	Lewoblolong	1.11	78	37	115	167	225	392	
4	Bungalawan	2.86	167	58	225	366	438	804	
5	Lamawolo	5.07	333	165	498	769	883	1652	
6	Helanlangowuyo	5.70	567	187	754	1393	1458	2851	
7	Lewopao	4.65	369	136	505	914	994	1908	
8	Gayak	1.44	73	29	102	160	176	336	
9	Boleng	2.86	242	125	367	622	662	1284	
10	Neleblolong	1.29	97	51	148	222	261	483	
11	Duablolong	2.11	194	92	286	475	476	951	
12	Lewokeleng	3.02	120	39	159	295	320	615	
13	Nelelamawangi	1.79	118	67	185	257	323	580	
14	Harubala	2.20	149	59	208	295	371	666	
15	Nelelamadike	2.14	263	102	365	629	656	1283	
16	Lamabayung	2.53	196	80	276	510	564	1074	
17	Lewat	2.00	124	29	153	275	271	546	
18	Dokeng	2.23	60	27	87	158	183	341	
19	Bayuntaa	1.01	84	40	124	197	227	424	
20	Nobo	1.44	124	76	200	314	333	647	
21	Nelelamawangi II	1.60	67	23	90	141	166	307	
	JUMLAH		3728	1564	5292	8891	9822	18713	

3. Jumlah PNS

Jumlah P N S pada Kantor Camat Ile Boleng adalah : 17 orang yang terdiri dari :

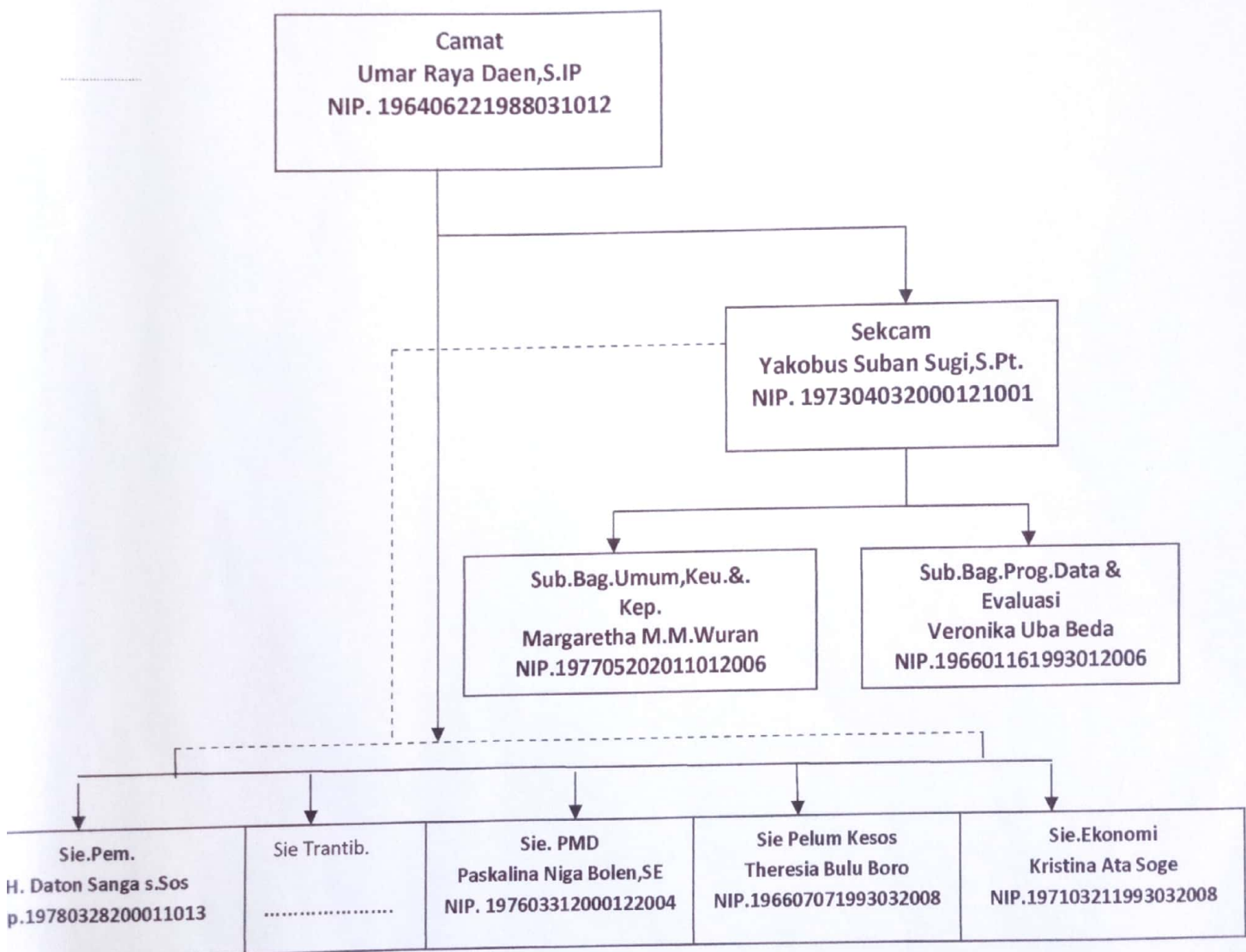
Pejabat Struktural Eselon III.b : 2 orang

Pejabat Struktural Eselon IV.a : 4 orang

Pejabat Struktural Eselon IV.b : 2 orang

Fungsional Umum : 9 orang

STRUKTUR ORGANISASI PNS KANTOR CAMAT ILE BOLENG



Pada tahun 2020, ada 2 orang Pejabat Eselon IV/a yang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi yaitu Pelum Kesos dan Trantib memasuki Batas Usia Pensiun sehingga kedua Seksi tersebut lowong sampai dengan tanggal 20 September 2021 ada Pelantikan Pejabat Eselon IV, sehingga Kepala Seksi Pelum Kesos dapat terisi sedangkan Seksi Trantib belum terisi.

Pada tanggal 22 November 2021 terjadi Pelantikan Eselon III sehingga Camat an. Jonas Eli Velet Spakoly S.Sos dan Sekretaris Camat an. Petrus Pehan Tukan, S.Sos mengalami mutasi diganti oleh Umar Raya Daen, S.IP. sebagai Camat dan Yakobus Suban Sugi S.Pt. sebagai Sekretaris Camat.

BAB. II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Ile Boleng tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ; 2021

No.	Program/Kegiatan	DPA Awal	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Realisasi	Sisa Pagu
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000		24.993.500	
1	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	25.000.000	25.000.000	-	24.993.500	6.500
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.261.335.016	1.261.335.016	-	1.128.191.150	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.236.495.016	1.236.495.016	-	1.103.351.150	133.143.866
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.840.000	24.840.000	-	24.840.000	-
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.940.000	71.339.000		71.339.000	
4	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000	12.859.000	5.359.000	12.859.000	-
5	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-
6	- Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	6.000.000	- 9.000.000	6.000.000	-
7	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25.440.000	37.480.000	12.040.000	37.480.000	-
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.310.000	90.810.000	- 57.500.000	89.760.000	1.050.000
8	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	810.000	810.000	-	810.000	-
9	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.500.000	9.500.000	-	9.500.000	-
10	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.000.000	80.500.000	-57.000.000	79.450.000	1.050.000
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.021.335	19.447.335	2.426.000	18.440.300	1.007.035
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.003.335	7.003.335	-	5.996.300	1.007.035
12	-Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.018.000	12.444.000	2.426.000	12.444.000	-

VI	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	67.800.000	60.560.000	- 7.240.000	54.860.000	5.700.000
13	-Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	67.800.000	60.560.000	- 7.240.000	54.860.000	5.700.000
VII	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.800.000	51.600.000	- 7.200.000	49.350.000	2.250.000
14	-Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	58.800.000	51.600.000	- 7.200.000	49.350.000	2.250.000
VIII	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64.700.000	48.395.000	- 16.305.000	48.060.000	335.000
15	- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.000.000	26.855.000	- 8.145.000	26.630.000	225.000
16	-Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	29.700.000	21.540.000	- 8.160.000	21.430.000	110.000
IX	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kepada Masyarakat (PPKM)		21.000.000	-	21.000.000	-
17	-Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat desa dan Kelurahan	-	21.000.000	-	21.000.000	-
	Jumlah	1.705.906.351	1.649.486.351		1.505.993.950	143.492.401

BAB. III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERITAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sesuai Program Kegiatan pada RKPD Kabuapten Flores Timur tahun 2021, maka Kantor Camat Ile Boleng mempunyai 4 (empat) Program, 10 Kegiatan dengan 23 sub Kegiatan.

Namun, sejak adanya wabah Virus Corona 19, maka Program kegiatan Belanja Modal tidak ditetapkan dalam APBD Kabupaten Flores Timur karena diprioritaskan untuk penanganan wabah Virus Corona 19, sehingga tersisa 8 kegiatan dengan capaian pelaksanaannya seperti terlihat pada tabel berikut ini :

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Target		Realisasi		%	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjauan Rekomendasi DPRD	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.000.000		24.993.500	99,97%	1. Keterbatasan Anggaran	1. Mengusulkan penambahan anggaran ditahun berikutnya	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dok.	25.000.000	6 Dokumen	24.993.500	99,97%	2. Anggaran Tidak diimbangi dengan luas wilayah dan jumlah desa	2. Mengusulkan kepada tim anggaran Kabupaten Flores Timur, agar dalam penetapan anggaran perlu juga mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah desa.	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.261.335.016		1.128.191.150	0,90%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17/12 bln	1.236.495.016	17/12 bln	1.103.351.150	0,90%			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 org/12 bln	24.840.000	4 org/12 bln	24.840.000	100,00%			
KANTOR CAMAT ILE BOLENG				Administrasi Umum Perangkat Daerah		71.339.000		71.339.000	100%	3. Kurangnya fasilitas/sarana penunjang kegiatan	3. Perlu adanya Belanja Modal pada Penetapan Anggaran ditahun berikutnya.	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30 jenis	12.859.000	30 jenis	12.859.000	100%			

			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 unit	12.444.000	1 unit	12.444.000	100%			
	KANTOR CAMAT ILE BOLENG	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		60.560.000		54.860.000	90,59%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 paket	60.560.000	1 paket	54.860.000	90,59%			
		PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		51.600.000		49.350.000	95,64%			
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 paket	51.600.000	1 paket	49.350.000	95,64%			

[illegible]

3.1.1. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Program

Kecamatan Ile Boleng sebagaimana Kecamatan pada umumnya di Kabupaten Flores Timur memiliki 8 (delapan) Program Kegiatan

Kedelapan Program Kegiatan tersebut terdapat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program apabila ditinjau dari sisi kuantitatif Pagu Anggaran Program dengan Kegiatan.

Akan tetapi ditinjau dari sisi kualitatif Kegiatan tentu masih terdapat kekurangan karena Pagu Anggaran Program tidak mencukupi membiayai kegiatan-kegiatan dengan berbagai Dinamika Permasalahan yang ada di wilayah.

Berdasarkan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tabel 3.1. di atas maka dapat dianalisa kesesuaian antara Kegiatan dengan target kinerja Program untuk tahun 2021 sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja anggaran	: Rp. 25.000.000
Realisasi Pelaksanaan Program	: Rp. 24.993.500
Rasio pencapaian	: 99,97 %

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target kinerja anggaran	: Rp. 71.339.000
Realisasi Pelaksanaan Program	: Rp. 71.339.000
Rasio pencapaian	: 100 %

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target Kinerja Anggaran	: Rp. 90.810.000
Realisasi Pelaksanaan Program	: Rp. 89.760.000
Rasio Pencapaian	: 98,84 %

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Target Pelayanan Anggaran	: 19.447.335
Realisasi Program Kegiatan	: 18.440.300
Rasio Pencapaian	: 94,82 %

5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Target Kinerja Anggaran	: Rp. 60.560.000
Realisasi Program Kegiatan	: Rp. 54.860.000
Rasio Pencapaian	: 90,59 %

6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Target Kinerja Anggaran	: Rp. 51.600.000
Realisasi Program Kegiatan	: Rp. 49.350.000
Rasio Pencapaian	: 95,64 %

7. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Target Kinerja Anggaran	: Rp. 48.395.000
Realisasi Program Kegiatan	: Rp. 48.060.000
Rasio Pencapaian	: 99,31 %

8. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Target Kinerja Anggaran	: Rp. 21.000.000
Realisasi Program Kegiatan	: Rp. 21.000.000
Rasio Pencapaian	: 100 %

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)

3.3. Kebijakan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4.11 Unit Organisasi : 4.11.4.11.13 Sub Unit Organisasi : 4.11.4.11.13.01				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan Kantor Camat Ile Boleng Kantor Camat Ile Boleng			
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)	
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL		
5	BELANJA DAERAH	1.649.486.351,00	0,00	1.505.993.950,00	1.505.993.950,00	(143.492.401,00)	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.261.335.016,00	0,00	1.128.191.150,00	1.128.191.150,00	(133.143.866,00)	
5.1.1	Belanja Pegawai	1.261.335.016,00	0,00	1.128.191.150,00	1.128.191.150,00	(133.143.866,00)	
5.1.1.01	Belanja Gaji Pokok ASN	841.728.832,00	0,00	785.243.300,00	785.243.300,00	(56.485.532,00)	
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	841.728.832,00	0,00	785.243.300,00	785.243.300,00	(56.485.532,00)	
5.1.1.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	77.745.444,00	0,00	71.546.166,00	71.546.166,00	(6.199.278,00)	
5.1.1.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	77.745.444,00	0,00	71.546.166,00	71.546.166,00	(6.199.278,00)	
5.1.1.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.466.600,00	0,00	68.300.000,00	68.300.000,00	(15.166.600,00)	
5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.466.600,00	0,00	68.300.000,00	68.300.000,00	(15.166.600,00)	
5.1.1.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.987.600,00	0,00	24.550.000,00	24.550.000,00	(6.437.600,00)	
5.1.1.05.01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.987.600,00	0,00	24.550.000,00	24.550.000,00	(6.437.600,00)	
5.1.1.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	56.878.360,00	0,00	52.504.500,00	52.504.500,00	(4.373.860,00)	
5.1.1.06.01	Belanja Tunjangan Beras PNS	56.878.360,00	0,00	52.504.500,00	52.504.500,00	(4.373.860,00)	
5.1.1.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.966.270,00	0,00	405.488,00	405.488,00	(3.560.782,00)	
5.1.1.07.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.966.270,00	0,00	405.488,00	405.488,00	(3.560.782,00)	
5.1.1.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.040,00	0,00	9.962,00	9.962,00	(2.078,00)	
5.1.1.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.040,00	0,00	9.962,00	9.962,00	(2.078,00)	
5.1.1.13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	56.683.910,00	0,00	40.316.693,00	40.316.693,00	(16.367.217,00)	
5.1.1.13.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	56.683.910,00	0,00	40.316.693,00	40.316.693,00	(16.367.217,00)	
5.1.1.17	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	85.025.960,00	0,00	60.475.041,00	60.475.041,00	(24.550.919,00)	
5.1.1.17.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	85.025.960,00	0,00	60.475.041,00	60.475.041,00	(24.550.919,00)	
5.1.1.24	Belanja Honorarium	24.840.000,00	0,00	24.840.000,00	24.840.000,00	0,00	
5.1.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24.840.000,00	0,00	24.840.000,00	24.840.000,00	0,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	388.151.335,00	0,00	377.802.800,00	377.802.800,00	(10.348.535,00)	
5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	388.151.335,00	0,00	377.802.800,00	377.802.800,00	(10.348.535,00)	
5.2.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	83.357.335,00	0,00	77.654.000,00	77.654.000,00	(5.703.335,00)	

Halaman 1 dari 2

Halaman 1 dari 2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed by Sindo

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.1.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.603.335,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	(3.335,00)
5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.089.000,00	0,00	7.089.000,00	7.089.000,00	0,00
5.2.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	810.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
5.2.1.01.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	7.145.000,00	0,00	7.145.000,00	7.145.000,00	0,00
5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.760.000,00	0,00	36.060.000,00	36.060.000,00	(5.700.000,00)
5.2.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.1.04	Belanja Jasa Kantor	159.600.000,00	0,00	155.289.800,00	155.289.800,00	(4.310.200,00)
5.2.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	51.600.000,00	0,00	49.350.000,00	49.350.000,00	(2.250.000,00)
5.2.1.04.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.000.000,00	0,00	45.400.000,00	45.400.000,00	(600.000,00)
5.2.1.04.27	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	23.000.000,00	0,00	22.700.000,00	22.700.000,00	(300.000,00)
5.2.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	11.500.000,00	0,00	11.350.000,00	11.350.000,00	(150.000,00)
5.2.1.04.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.04.59	Belanja Tagihan Telepon	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
5.2.1.04.60	Belanja Tagihan Air	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00
5.2.1.04.61	Belanja Tagihan Listrik	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00
5.2.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.400.000,00	0,00	1.396.300,00	1.396.300,00	(1.003.700,00)
5.2.1.04.71	Belanja Lembur	15.600.000,00	0,00	15.593.500,00	15.593.500,00	(6.500,00)
5.2.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.494.000,00	0,00	11.494.000,00	11.494.000,00	0,00
5.2.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	11.494.000,00	0,00	11.494.000,00	11.494.000,00	0,00
5.2.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	133.700.000,00	0,00	133.365.000,00	133.365.000,00	(335.000,00)
5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.700.000,00	0,00	133.365.000,00	133.365.000,00	(335.000,00)
SURPLUS / DEFISIT		(1.649.486.351,00)	0,00	(1.505.993.950,00)	(1.505.993.950,00)	143.492.401,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(1.649.486.351,00)	0,00	(1.505.993.950,00)	(1.505.993.950,00)	143.492.401,00

BAB. IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

(Diisi oleh OPD yang melaksanakan tugas pembantuan)

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Ile Boleng ini disusun dengan maksud memberikan informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng selama Tahun 2020 kepada Para Stakeholder di Kabupaten Flores Timur, untuk dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif dalam menilai Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng, demi perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dimasa yang akan datang.

Selain itu, hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain:

1. Personil Kecamatan belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*good governance*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya. optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya, sehingga Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2021 sudah dirasa mengarah kepada tingkatandiperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
3. Adanya kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (Penegakan Hukum, Akuntabilitas dan Professional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
4. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
5. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

B. Saran

Memperhatikan isi Laporan ini, maka kendala-kendala yang dihadapi tersebut serta upaya/langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Ile Boleng sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Ile Boleng;
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur pelaksana Program dan Kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.
7. Diperlukan merehabilitasi gedung Kantor Camat yang saat ini terasa kurang memadai lagi karena tidak dapat menampung para pegawai dalam melaksanakan tugas. Atau dilakukan perluasan gedung agar semua pegawai yang bekerja di kantor camat dapat tertampung dalam ruang kerja dan nyaman dalam melaksanakan aktivitas.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tingkat Kecamatan Ile Boleng ini dibuat dan tentunya masih ada kekurangan yang harus di sempurnakan pada masa yang akan datang. Untuk itu, kami sangat mengharapkan masukan/usul saran dan pertimbangan dari Bapak Bupati untuk perbaikan dan kiranya laporan ini dapat digunakan sebagai bagian dari Laporan yang tergabung dengan SKPD lainnya.

Sekian dan terima kasih.

Senadan, 31 Januari 2022

Camat Ile Boleng,

UMAR RAYA DAEN, S.JP
Pembina
NIP.196406221988031012.